

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan Pegawai di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan: proses pendataan internal bagian mana yang membutuhkan tambahan pegawai yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya di ajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan juga ke Menpan RB, dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Keuangan terkait alokasi anggaran untuk belanja pegawai serta panduan teknis dari BKN.
2. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengajuan pegawai adalah: kurang segera ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga menunggu waktu yang cukup lama untuk pemenuhan pegawai serta kurang tepatnya kompetensi dan keahlian pegawai yang lolos seleksi dengan kebutuhan kompetensi dan keahlian diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengajuan pegawai sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak menunggu waktu yang cukup lama untuk pemenuhan pegawai serta pengabulan atau memberi pegawai yang lolos seleksi memiliki kompetensi dan keahlian pegawai yang sesuai dengan pengajuan.
2. Rekrutmen Pegawai ASN harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas seorang pemimpin, sehingga mampu menjalankan pengawasan secara jujur dan objektif, termasuk dalam mengawasi proses perekrutan PNS.
3. Pemerintah harus mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pelamar ASN yang terbukti terlibat dalam tindakan suap kepada pejabat pemerintah.